

# DUNIA PENDIDIKAN KITA

Oleh: Zahra A

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap manusia tanpa terkecuali di sepanjang hayatnya. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang, bahkan akan menjadi terbelakang. Namun sebaliknya dengan pendidikan manusia menjadi bermartabat, Pendidikan merupakan unsur dasar yang dapat mengantarkan seseorang bisa berpikir tentang dirinya dan lingkungannya.

Pendidikan bisa mengantarkan orang-orang Jahiliyah (bodoh) di masa Rasul Muhammad SAW menjadi mulia. Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, di samping memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik.

Tujuan pendidikan di Negara kita sudah digariskan dalam UU Sisdiknas 2003 Pasal 34 Ayat (2) dan (3), dan sesuai dengan amanat Pembukaan UUD, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan harus mampu mempersiapkan warga negara agar dapat berperan aktif dalam seluruh lapangan kehidupan, cerdas, aktif, kreatif, terampil, jujur, berdisiplin dan bermoral tinggi, demokratis, dan toleran dengan mengutamakan persatuan bangsa dan bukannya perpecahan.



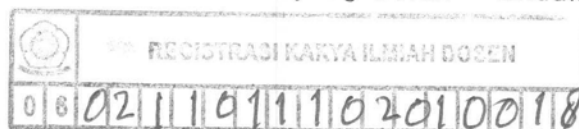
Pertanyaannya, sudahkah harapan tersebut terealisasi? Dengan tegas dapat kita jawab, belum, bahkan masih jauh dari harapan. Kondisi yang ada sekarang masih 'semrawut' (walaupun tidak seluruhnya, ada juga prestasi dunia pendidikan yang sudah dapat dicapai dengan baik).

Kacau balaunya dunia pendidikan di tanah air hampir tiap hari dapat kita saksikan di media massa baik cetak maupun elektronik. Kita masih sering mendapati tulisan yang menyatakan, pendidikan masyarakat Indonesia masih tertinggal dan seabrek persoalan pendidikan lainnya. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian serius pemerintah, belum dikelolanya pendidikan secara serius dan profesional, ditambah pula proses manajemen yang tidak transparan dan kebijakan yang tidak tepat sasaran, semakin membuat dunia pendidikan bangsa kita dirundung persoalan.

Tak heran, kalau berbicara tentang pendidikan nasional terkesan selalu yang buruk-

buruknya saja. Bahkan ada selorohan, "Setiap ada perubahan menteri, persoalan yang hangat diperbincangkan selalu berkutat pada masalah undang-undang, kurikulum, kebijakan ujian, insentif para guru dan keterbatasan anggaran". Namun, kebijakan sering mengecewakan. Padahal negara kita dianggap salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang memadai sebagai modal utama untuk membangun negara. Tetapi, kenyataannya kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi musuh utama. Kita mungkin sudah lupa bahwa kemajuan sebuah bangsa terletak dari baik-buruknya kualitas manusia atau indeks pembangunan manusianya. Jhon Neisbitt dalam bukunya Mega Trend 2000 mengingatkan kita, "Suatu negara miskin pun bisa bangkit, bahkan tanpa sumber daya alam yang melimpah ruah, asalkan negara yang bersangkutan melakukan investasi yang cukup, yaitu dalam hal kualitas sumber daya manusianya".

Kurangnya keseriusan perhatian pemerintah akan perlunya pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas menyebabkan terjadinya kemerosotan di dunia pendidikan. Akibatnya, terjadi peningkatan kemiskinan dan pengangguran yang disusul merebaknya tindakan kejahatan di tengah masyarakat. Kebodohan menyebabkan pengangguran. Pengangguran menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan terhalangnya mendapatkan pendidikan sehingga bodoh. Kebodohan, pendidikan, kemiskinan, pengangguran, dan tindak kejahatan, begitulah





seterusnya bagaikan lingkaran setan. Oleh sebab itu pendidikan harus ditangani secara 'benar', transparan, profesional, serta tepat sasaran. Bila tidak, peningkatan kualitas manusia ini dan usaha mencapai ke arah itu akan tetap berjalan di tempat.

Realitas Pendidikan yang kian mensubordinasi dan memarginalisasi masyarakat merupakan ancaman terhadap demokratisasi dan tujuan pendidikan. Sejatinya, segenap masyarakat dapat mengenyam pendidikan sama dengan masyarakat mampu yang lain karena Pendidikan merupakan hak seluruh warga masyarakat.

Sudah saatnya Pemerintah dan orang-orang yang berkompeten di Bidang ini melihat hal itu, memikirkan kembali dunia pendidikan yang kian terpuruk. Potensi penduduk kita yang cukup besar merupakan sumber daya yang sangat potensial untuk menghasilkan orang-orang yang berkualitas. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan anak bangsa ini dari kebodohan, ketertindasan, bahkan kejahiliyahan struktural yang kian marak, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, pendidikan itu tanggungjawab semua warga negara, bukan hanya tanggung jawab sekolah dan atau pemerintah. Konsekuensinya semua warga negara memiliki kewajiban moral untuk menyelamatkan pendidikan. Pendidikan jangan dimasuki unsur 'politik'. Penyelenggara dan pengelola pendidikan harus diberi kebebasan untuk berprakarsa dan mengupayakan pendidikan yang paling sesuai.

Negara menggariskan kebijakan dan petunjuk umum, yang merupakan rambu-rambu penjamin hak-hak warga sehubungan dengan pendidikan. Di luar itu segala sesuatu diserahkan kepada kebijakan penyelenggara dan pengelola. Mereka akan melaksanakan tugas mendidik dengan baik dan efisien, apabila tidak terlalu dibatasi oleh

**"Setiap ada perubahan menteri, persoalan yang hangat diperbincangkan selalu berkuat pada masalah undang-undang, kurikulum, kebijakan ujian, insensif para guru dan keterbatasan anggaran"**

ketetapan/keputusan penguasa (politis!). Penyelenggara, pengelola, serta sekolah itu sendiri akan dinilai terus-menerus oleh masyarakat berdasarkan mutu lulusannya. Penilaian ini lebih menjamin mutu yang sebenarnya dan bukan semata-mata mutu di lembar kertas resmi.

Kedua, kurikulum pendidikan, metodologi pengajaran, sitem evaluasi dan kesejahteraan guru, hal penting yang harus terus dievaluasi dan diperbaiki. Masalah kurikulum misalnya, terlalu padat dan tidak hirarki bahkan over laping, atau terlalu banyaknya pelajaran. Masalah metodologi pengajaran juga perlu terus dikembangkan ( ini kewajiban guru), siswa merasa tertekan di sekolah, mereka tidak bahagia, sebagian besar merasa terpaksa ke sekolah.

Masalah sistem evaluasi juga perlu terus diperbaiki, misalnya masalah Ujian Nasional (UN) yang hingga kini masih dipertanyakan. UN baik tetap dilaksanakan tetapi bukan sebagai satu-satunya penentu kelulusan-hal itu bertentangan dengan prinsip KBK dan juga KTSP. Perlu dirancang suatu sistem pendidikan yang mampu menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menyenangkan, merangsang dan menantang peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik berkembang secara optimal. Mutu pendidikan akan lebih berhasil jika ditunjang fasilitas-fasilitas yang memadai dan peralatan yang lengkap.

Ketiga, pendidikan itu tidak hanya untuk mencerdaskan intelektual (IQ) anak, tetapi sekaligus juga kecerdasan spiritual (SQ), kecerdasan rasa (EQ), dan lainnya, agar mereka tidak hanya pintar tetapi juga bermoral.

Keempat, berkaitan dengan biaya pendidikan, sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah, diantaranya 'program sekolah gratis' dan beasiswa bagi yang berprestasi, seperti program Beasiswa Bidik Misi untuk memberikan beasiswa dan biaya pendidikan kepada 20.000 mahasiswa dan atau calon mahasiswa dari keluarga yang secara ekonomi kurang mampu, tetapi berprestasi, baik di bidang akademik/kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler.

Program ini sangat penting untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan cara elegan. Program ini sangat baik dan bermanfaat dalam upaya menjangkau sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Harapan kita tentu saja agar program penyaluran beasiswa tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip 3T, yaitu: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan tidak ada unsur kolusi, korupsi, dan novotisme dalam pengelolaannya, proses penyaluran beasiswa kepada mahasiswa diharapkan akan berjalan dengan lebih baik, dan mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan lancar, berprestasi tepat waktu yang akhirnya dapat ikut andil dalam meneruskan perjuangan bangsa menuju pembangunan Indonesia sejahtera.

**Penulis adalah tenaga pengajar di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Sriwijaya**

